

# RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PEMBINAAN BUMD

# 2024

---

[www.bpbumdjakarta.go.id](http://www.bpbumdjakarta.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selain itu penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun kota Jakarta yang kita cintai agar sukses Jakarta untuk Indonesia ini dapat segera terwujud.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nasruddin Djoko Surjono  
NIP. 197306201999031002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam dokumen ini berisikan tentang Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang disusun untuk mewujudkan target kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024.

Sebelum menyusun target kinerja dan kegiatan pada tahun 2024. Secara singkat perlu digambarkan realisasi kinerja BP BUMD tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023. Pada tahun 2022 terdapat 2 program dengan 2 indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 75,3%. Sementara dari sisi anggaran, pada tahun 2022 BP BUMD memiliki anggaran sebesar Rp. 25,3 Miliar dengan persentase realisasi sebesar 84,87 persen. pada tahun 2023 diproyeksikan pencapaian kinerja BP BUMD mencapai lebih dari 90%. Hal tersebut sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional yang mulai mengarah kepada peningkatan walaupun belum sepenuhnya membaik. Sementara untuk tahun 2024 target kinerja berdasarkan Dokumen Renstra BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 diproyeksikan total kebutuhan anggaran sebesar Rp.29.588.164.991,- dengan total 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Jumlah kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan yang mendukung pencapaian RPD, sementara itu BP BUMD tidak memiliki kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Secara umum pada tahun 2024 BP BUMD Provinsi DKI Jakarta menjalankan 2 program dengan rencana total 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, total anggaran sebesar Rp. 29.588.164.991,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.29.360.281.752,- dan belanja modal sebesar Rp.227.883.239,-

Pada akhirnya dokumen Renja BP BUMD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026. Selanjutnya akan menjadi pedoman di dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD tahun 2024.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i-1
Ringkasan Eksekutif	i-2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan .....	III-4
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>V-1</b>

# PENDAHULUAN

---

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



## **1.1 Latar Belakang**

RPD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
20. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
37. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
38. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
39. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
40. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
41. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 63/SE/2019 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV;
43. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pembinaan BUMD ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pembinaan BUMD.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, tema pembangunan pada tahun 2024 adalah **“AKSELERASI KEUNGGULAN JAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BERDAYA SAING GLOBAL YANG BERKETAHANAN, INKLUSIF DAN BERKEADILAN”**.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Pembinaan BUMD tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Pembinaan BUMD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan BUMD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pembinaan BUMD, program dan kegiatan.

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

##### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



---

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan  
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-  
isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review  
Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan  
Masyarakat

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pembinaan BUMD**

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pembinaan BUMD dan Capaian Renstra Badan Pembinaan BUMD pada Tahun 2022. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Pembinaan BUMD Tahun 2022 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Pembinaan BUMD pada Tahun 2022. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2023.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2022 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Program yang digunakan pada Renja Tahun 2024 sama dengan tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022 dan 2023 program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) program yang masing-masing memiliki 1 (satu) indikator yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Realisasi capaian Program Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu kontribusi deviden dengan realisasi 50,7%. Selain itu untuk indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi indikator program sebesar 100%.

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	kontribusi deviden	Total Deviden dari BUMD dan Perusahaan Patungan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang telah disahkan oleh RUPS/Keputusan Kepala Badan serta telah disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	793 M	402 M	50,7 %	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Indeks 1 = 0%-25%, indeks 2 = >25% - 50%, indeks 3 = >50% - 75%, dan indeks 4 = >75% - 100%	4	4	100 %	

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa dari 2 (dua) Program tersebut terdapat 1 (Satu) program yang tidak mencapai target. Tidak maksimalnya pencapaian target indikator tersebut dikarenakan dampak dari pandemi covid 19 yang meningkat pada triwulan I dan II tahun 2021, sehingga mengakibatkan turunnya performa bisnis BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMD. Sementara dengan kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat, hampir seluruh BUMD mengalami kontraksi dari sisi kinerja operasional sehingga target yang telah ditetapkan pada awal tahun harus disesuaikan mengikuti kondisi akibat pandemic Covid-19.

Dengan demikian pencapaian kinerja Badan Pembinaan BUMD berdasarkan realisasi indikator kinerja yang dibandingkan oleh target di dalam RPJMD dan Renstra Badan Pembinaan BUMD tahun 2017-2022 cukup baik.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pembinaan BUMD dan pencapaian Renstra Badan Pembinaan BUMD sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan Badan Pembinaan BUMD pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 Badan Pembinaan BUMD memiliki 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang semuanya dapat dicapai dengan maksimal.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pembinaan BUMD s.d. Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
										Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Badan Pembinaan BUMD	4						Usuran Pendukung Urusan Pemerintahan									
Badan Pembinaan BUMD	4	1					Sekretariat Daerah									
Badan Pembinaan BUMD	4	1	6				Program Perekonomian dan Pembangunan	Kontribusi Deviden	2.877	793	402	50,7%	0	0	0	Miliar Rupiah
Badan Pembinaan BUMD	4	1	6	1	3		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD		4	4	100%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	4	1	6	1	3	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah calon pengurus BUMD yang terseleksi		46	46	100%	0	290		Orang
Badan Pembinaan BUMD								Jumlah laporan kinerja Tenaga Ahli dalam pengelolaan dan pengembangan SI BUMD		28	28	100%	0	80		Laporan
Badan Pembinaan BUMD								Jumlah dokumen analisa kebijakan strategis pengembangan BUMD yang tersusun		14	14	100%	0	39		Dokumen
Badan Pembinaan BUMD								Jumlah dokumen analisis kebijakan strategis pembinaan BUMD yang tersusun		5	5	100%	0	13		Dokumen



Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
										Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
	5						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	5	2					Keuangan									
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	4	4	4	100%	4	4	100%	Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4	4	100%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai kepuasan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		4	4	100%	0	4		Nilai
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan layanan penyediaan jasa administrasi keuangan		4	4	100%	0	4		Nilai
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4	4	100%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor		4	4	100%	0	4		Nilai
Badan Pembinaan BUMD								Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	4	100%	0	4		Nilai
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4	4	100%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		4	4	100%	0	4		Nilai

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
										Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman		4	4	100%	0	4		Nilai
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi		4	4	100%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		96	96	100%	0	286		Laporan
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4	100%	25%	0	4		Indeks
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang disediakan perizinannya		4	4	100%	0	4		Unit
Badan Pembinaan BUMD								Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara		4	4	100%	0	4		Unit
Badan Pembinaan BUMD	5	2	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap pemeliharaan perlengkapan kantor		4	4	100%	0	4		Nilai

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pembinaan BUMD**

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki indikator kinerja yang telah ditentukan di dalam NSPK, SPM, maupun IKK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 97 tahun 2016 bahwa Badan Pembinaan BUMD menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Tolak ukur kinerja ditentukan di dalam dokumen perencanaan yang ada seperti RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD tahun 2023 – 2026.

Penyusunan target kinerja yang termuat di dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD tahun 2023 – 2026 berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2022

NO	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NIHIL											

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi diantaranya perumusan kebijakan bisnis BUMD, Pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru, monitoring dan pengelolaan BUMD, Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMD, pengkajian dan pengesahan dokumen rencana BUMD.

Dalam melakukan pembinaan kepada BUMD, Badan Pembinaan BUMD melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dengan total anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 25,3 Miliar dengan realisasi anggaran 84,87%. Pelaksanaan kegiatan dengan anggaran melalui APBD memiliki target outcome agar kinerja BUMD semakin meningkat.

Berdasarkan laporan keuangan BUMD tahun 2022 total aset BUMD meningkat dari tahun 2021 yang pada awalnya 159,5 Triliun menjadi 175,5 Triliun sementara pendapatan usaha mengalami penurunan dari 29,1 Triliun menjadi 27,4 Triliun. Deviden yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 398,7 miliar menjadi 402 Miliar. Belum maksimalnya kinerja BUMD disebabkan karena dampak dari pandemi covid 19 yang meningkat pada triwulan I dan II tahun 2021, sehingga mengakibatkan turunnya performa bisnis BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi diantaranya belum terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan dokumen peta jabatan dan analisis jabatan sebesar 86 orang, saat ini Badan Pembinaan BUMD memiliki 45 orang pegawai. Selain jumlah SDM yang belum terpenuhi permasalahan lain terkait SDM adalah kompetensi SDM yang belum sepenuhnya memiliki latar belakang Pendidikan terkait bisnis, permasalahan selanjutnya adalah belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung pelayanan Badan Pembinaan BUMD sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan pelayanan kepada BUMD. Isu berikutnya adalah terkait krisis global baru akibat konflik antara Eropa dan Rusia serta banyaknya negara-negara yang mengalami resesi ekonomi.

Dengan memperhatikan berbagai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD sebagaimana telah dijelaskan maka perlu ditelaah lebih lanjut sebagai bahan masukan dan rekomendasi dalam menentukan atau merumuskan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024. Setiap kegiatan yang direncanakan harus dapat menyelesaikan setiap masalah dan hambatan serta menjawab peluang dan kesempatan.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen rancangan awal RKPD memuat daftar usulan kegiatan strategis yang diusulkan dalam Rencana Kerja SKPD tahun 2024. Berdasarkan rancangan awal kegiatan strategis yang diusulkan oleh Badan Pembinaan BUMD terdapat 3 (tiga) rincian aktifitas utama yang mendukung kegiatan strategis diantaranya :

1. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Calon Pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan;
2. Penyusunan Dokumen Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal Daerah; dan
3. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD.

Dari ketiga aktivitas di atas akan dimasukkan ke dalam 1 kegiatan utama yaitu kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang terbagi menjadi 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pembinaan BUMD

Lembar .... dari

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BPBUMD	4.01.0 6	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	DKI Jakarta	1. Rata-rata nilai ROE 2. Pertumbuhan Laba Bersih 3. Pertumbuhan Pendapatan Usaha	1. 8 Nilai 2. 13 % 3. 11 %	3.002.388.000	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	DKI Jakarta	1. Rata-rata nilai ROE 2. Pertumbuhan Laba Bersih 3. Pertumbuhan Pendapatan Usaha	1. 8 Nilai 2. 13 % 3. 11 %	5.292.928.000	
BPBUMD	4.01.0 6.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD	12 Dokumen	3.002.388.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD	12 Dokumen	5.292.928.000	
BPBUMD	4.01.0 6.1.03 .01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	12 Dokumen	3.002.388.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	12 Dokumen	5.292.928.000	
BPBUMD	4.01.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>28.096.810.286</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>24.295.236.991</b>	

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BPBUMD	4.01.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	22.359.191.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	22.357.201.000	
BPBUMD	4.01.0 1.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	22.347.646.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	22.347.646.000	
BPBUMD	4.01.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	11.545.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	9.555.000	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.330.805.032	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	894.980.798	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.261.632	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.893.322	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.870.326	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.988.654	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.417.220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.417.220	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	56.428.800	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	79.854.948	
BPBUMD	4.01.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	4 Laporan	555.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	4 Laporan	223.960.000	



Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			
	4.01.0 1.1.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	479.827.054	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	419.866.654	
BPBUMD	4.01.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	3.595.374.625	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	220.590.805	
BPBUMD	4.01.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3.595.374.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	220.590.805	
BPBUMD	4.01.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	711.954.751	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	732.417.776	
BPBUMD	4.01.0 1.1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	168.271.560	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	168.271.560	
BPBUMD	4.01.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	96 Laporan	543.683.191	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	96 Laporan	564.146.216	

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
BPBUMD	4.01.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	99.484.878	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	90.046.612	
BPBUMD	4.01.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	54.980.449	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	57.610.858	
BPBUMD	4.01.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	44.504.429	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	32.435.754	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pembinaan BUMD untuk tahun 2024 tidak mendapatkan usulan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Seluruh kegiatan merupakan prioritas provinsi berupa KSD dan prioritas SKPD dalam rangka pencapaian RPD dan Rencana Strategis BP BUMD 2023-2026.

# TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

---

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024**

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan dalam menyusun Renja Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema “Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”.

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan dalam menyusun Renja Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Merujuk kepada 7 agenda tersebut, tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Keuangan.

#### **3.1.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023**

Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### 3.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 4 (empat) dari 17 Tujuan TPB/SDGs, yaitu:

- Goals 7 – Energi bersih dan terjangkau
- Goals 8 – Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- Goals 9 – Industri, inovasi dan infrastruktur
- Goals 17 – kemitraan untuk mencapai tujuan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dimana tujuannya adalah Mewujudkan BUMD Unggul Melalui Kapasitas Manajemen Berdaya Saing serta Aspek Keuangan yang Kuat dan Bersinergi serta sasarannya adalah Peningkatan Nilai dan Peran BUMD Terhadap Pelayanan dan Pembangunan Jakarta. Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan BUMD Unggul Melalui Kapasitas Manajemen Berdaya Saing serta Aspek Keuangan yang Kuat dan Bersinergi		Persentase BUMD kategori sehat	84%	92%	100%	100%
		Peningkatan Nilai dan Peran BUMD Terhadap Pelayanan dan Pembangunan Jakarta	Persentase BUMD dengan penilaian GCG kategori sangat baik	38%	46%	53%	69%
			Nilai Deviden yang disetor	523	623	774	957
			Persentase Kontribusi BUMD dalam Pembangunan Kota	100 %	100 %	100%	100%

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pembinaan BUMD pada Tabel 3.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Pembinaan BUMD pada tahun 2023, maka prioritas kerja Badan Pembinaan BUMD pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan pengurus dan calon pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan;
2. Penyusunan Dokumen Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal Daerah;
3. Penyusunan Analisis Kebijakan Strategis Pembinaan BUMD;

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja 2024 menggunakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu terdiri 2 Program antara lain:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Rincian program, kegiatan dan subkegiatan serta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/ Target	Sub Kegiatan	Outcome/ Target	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Badan Pembinaan BUMD	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Rata-rata nilai ROE Target: 8 Nilai 2. Pertumbuhan Laba Bersih Target: 13% 3. Pertumbuhan Pendapatan Usaha Target: 11%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Target: 12 Dok	5.292.928.000	5.292.928.000	
2	Badan Pembinaan BUMD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 4 Indeks	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target: 40 Orang	22.347.646.000	22.347.646.000	
4	Badan Pembinaan BUMD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Target: 4 Dok	9.555.000	9.555.000	
5	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Target: 1 Paket	117.893.322	117.893.322	
6	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Target: 5 Paket	23.988.654	23.988.654	



No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/ Target	Sub Kegiatan	Outcome/ Target	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Target: 1 Paket	29.417.220	29.417.220	
8	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Target: 1 Paket	79.854.948	79.854.948	
9	Badan Pembinaan BUMD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target: 4 Laporan	223.960.000	223.960.000	
	Badan Pembinaan BUMD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Target: 4 Dok	419.866.654	419.866.654	
10	Badan Pembinaan BUMD				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Target: 15 Unit	220.590.805	220.590.805	
11	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Target: 4 Laporan	168.271.560	168.271.560	
12	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Target: 96 Laporan	564.146.216	564.146.216	

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/ Target	Sub Kegiatan	Outcome/ Target	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Badan Pembinaan BUMD				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target: 3 Unit	57.610.858	57.610.858	
15	Badan Pembinaan BUMD				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Target: 75 Unit	32.435.754	32.435.754	

# RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

---

Renja Perangkat Daerah



Rencana Kerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 secara garis besar proyeksi total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp.29.588.164.991,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.29.360.281.752,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.22.347.646.000,- dan belanja barang dan jasa Rp.7.012.635.752,- serta belanja modal sebesar Rp.227.883.239,-. Jumlah keseluruhan anggaran Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta berasal APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang akan dituangkan ke dalam DPA Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan 2 program (mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Rencana Kerja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024 beserta rencana pendanaannya yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )/ Sub Kegiatan ( <i>output</i> )	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pembinaan BUMD	4						Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan								
Badan Pembinaan BUMD	4	01					Sekretariat Daerah				29.588.164.991				29.588.164.991
Badan Pembinaan BUMD	4	01	06				Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Rata-rata nilai ROE 2. Pertumbuhan Laba Bersih 3. Pertumbuhan Pendapatan Usaha	DKI Jakarta	1. 8 Nilai 2. 13 % 3. 11 %	5.292.928.000	APBD		1. 9 Nilai 2. 14 % 3. 12 %	5.292.928.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	06	1	03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD	DKI Jakarta	12 Dok	5.292.928.000	APBD		12 Dok	5.292.928.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	06	1	03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	DKI Jakarta	12 Dok	5.292.928.000	APBD		12 Dok	5.292.928.000

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	24.295.236.991	APBD		4 Indeks	24.295.236.991
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	22.357.201.000	APBD		4 Indeks	22.357.201.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	40 Orang	22.347.646.000	APBD		42 Orang	22.347.646.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dok	9.555.000	APBD		4 Dok	9.555.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	894.980.798	APBD		4 Indeks	894.980.798
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	117.893.322	APBD		2 Paket	117.893.322
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	5 Paket	23.988.654	APBD		5 Paket	23.988.654
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	29.417.220	APBD		1 Paket	29.417.220

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	79.854.948	APBD		1 Paket	79.854.948
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	223.960.000	APBD		4 Laporan	223.960.000
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	419.866.654	APBD		4 Dokumen	419.866.654
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	220.590.805	APBD		4 Indeks	220.590.805
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	16 Unit	220.590.805	APBD		16 Unit	220.590.805
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	732.417.776	APBD		4 Indeks	732.417.776
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	168.271.560	APBD		4 Laporan	168.271.560

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )/ Sub Kegiatan ( <i>output</i> )	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	96 Laporan	564.146.216	APBD		96 Laporan	564.146.216
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	90.046.612	APBD		4 Indeks	90.046.612
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	3 Unit	57.610.858	APBD		3 Unit	57.610.858
Badan Pembinaan BUMD	4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	75 Unit	32.435.754	APBD		75 Unit	32.435.754



# PENUTUP



---

Penutup dokumen Renja

Dokumen Renja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.